

BRIEF SCRUTINY

Evaluasi Dua Tahun
Pemerintahan Prabowo-Gibran
25 Oktober 2025

Disusun oleh:



HIGHLIGHT

Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menampilkan hal yang jarang terjadi sejak Reformasi yakni hampir tidak ada perlawanan politik. Tujuh dari delapan fraksi partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang setara dengan 470 dari 580 kursi atau 81 persen, bergabung dalam koalisi pemerintah. Satu-satunya partai di luar kabinet, PDI-P, menyebut dirinya sebagai “penyeimbang”, bukan oposisi, dan tidak pernah menolak atas rancangan undang-undang (RUU) yang diajukan pemerintah.

Dukungan itu membuat pemerintah relatif cepat mengambil keputusan. Undang-undang strategis disahkan dalam hitungan minggu, dan anggaran program unggulan Makanan Bergizi Gratis (MG) yang dicatat dalam fungsi pendisihan hampir empat kali lipat dalam setahun, dari Rp56,8 triliun menjadi Rp223,6 triliun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan stabilitas, di mana ekonomi dicatat tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026 dan kemiskinan turun ke 8,07 persen pada Maret 2026.

Namun, kecepatan pengambilan keputusan tidak sama dengan ketepatan. Pada periode yang sama, Kementerian Kesehatan mentata 50.059 korban keracunan MB dari 560 kejadian per 2 September 2026, Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN), dan ketimpangan pendapatan justru naik. Kepuasan publik pun turun tajam, yang menurut Poltracking dari 78,1 persen menjadi 55,3 persen, dan menurut SMRC 81,2 persen menjadi 44,5 persen dalam setahun terakhir.

LIMA TEMUAN KUNCI

- Kekuasaan terkumpul di tiga arena sekaligus: 81 persen kursi DPR, kabinet 109 orang yang dirombak tujuh kali, dan rotasi pucuk TNI-Polri yang dibarengi undang-undang yang memperluas peran aparat di jabatan sipil.
- DPR tidak memakai alat pengawasannya: nol hak angket dan nol interpelasi dalam dua tahun, sementara dua undang-undang aparat disahkan cepat dengan partisipasi terbatas.
- MBG tumbuh lebih cepat daripada kemampuan mengawasinya: anggaran naik sekitar empat kali lipat, baru 56,72 persen dapur bersertifikat higiene, korban keracunan melampaui 50 ribu, dan tujuh tersangka korupsi.
- Pola “cepat belanja, lambat reformasi” berulang: program yang digerakkan perintah dan anggaran bergerak cepat, sedangkan program yang menuntut pembenahan lembaga, seperti penerimaan negara, tertinggal.
- Koreksi terlambat dan bergantung pada eksekutif: koreksi berarti atas MBG baru datang 16–19 bulan setelah peluncuran, sebagian besar oleh lembaga di bawah Presiden, dan belum menyentuh desain program.

ANALISIS

1. KEKUASAAN TERKUMPUL DI TIGA ARENA: PARTAI, KABINET, DAN APARAT

Dalam sistem presidensial dengan banyak partai seperti Indonesia, presiden tidak bisa memerintah sendirian. Ia perlu “membeli” dukungan. Ilmuwan politik Chaisty, Cheeseman, dan Power (2018) menyebut alat-alat yang dipakai presiden untuk itu sebagai executive toolbox atau kotak peralatan presiden: kursi kabinet, kendali atas anggaran, kewenangan membuat aturan, pengelolaan partai, dan pemberian keistimewaan. Presiden juga merangkul aktor di luar partai, terutama militer, polisi, dan birokrasi. Dua tahun pemerintahan Prabowo menunjukkan semua alat itu dipakai, di tiga arena sekaligus.

Arena partai. Koalisi KIM Plus (Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, Demokrat) menguasai 81 persen kursi DPR. Prabowo sendiri menyebut adanya “koalisi batin” dengan partai di luar koalisi formal (detikNews, 25 Februari 2025). Pada 31 Juli 2025, DPR menyetujui amnesti bagi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, yang diusulkan Presiden sehari sebelumnya. Lima hari kemudian, Megawati menyatakan PDI-P “bukan oposisi dan bukan pula koalisi” (Tempo, 2 Agustus 2025). Kader Gerindra memegang posisi kunci pengatur agenda di DPR, yaitu Wakil Ketua DPR dan Ketua Komisi III.

Arena kabinet. Kabinet Merah Putih dilantik dengan 109 orang (48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri), terbesar sejak 1966. Hingga 1 Oktober 2026, kabinet dirombak tujuh kali (CNBC Indonesia, 1 Oktober 2026). Perombakan terakhir memperlihatkan arah yang jelas: purnawirawan jenderal Dudung Abdurachman menjadi Menko Polkam, mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjadi Kepala Staf Kepresidenan, dan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menjadi Menko Hilirisasi. Jabatan Sekretaris Kabinet bahkan dapat diisi perwira TNI aktif setelah Sekretariat Kabinet dilebur ke Kemensetneg (Perpres 139/2024).

Arena aparat keamanan. Ini arena yang paling sering luput. UU TNI 2025 menambah jumlah lembaga sipil yang boleh diisi prajurit aktif dari 10 menjadi 14, dan UU Polri 2026 membuka jabatan sipil bagi polisi aktif. Pada Oktober 2026, rotasi besar terjadi dalam dua pekan. Kapolri baru, Suyudi Ario Seto, diusulkan, diuji di DPR, disetujui, dan dilantik dalam satu hari (1 Oktober). Ia lalu memutasi 301 perwira melalui tiga surat telegram. Enam Kodam baru diresmikan sehingga totalnya menjadi 27, Pangkostrad baru adalah anggota ekspedisi Everest 1997 yang digagas Prabowo (Kompas.com; Antara), dan KSAD serta Wakil Panglima TNI baru dilantik pada 15 Oktober.

Namun demikian, pola ini perlu dibaca adil. Panglima TNI, Kepala BIN, dan Jaksa Agung yang diangkat atau diusulkan pada era Jokowi tetap dipertahankan, dan Listyo Sigit tidak disingkirkan, melainkan diberi jabatan baru di Istana. Pimpinan TNI juga menyebut rotasi sebagai siklus biasa setelah dua tahun bertugas. Karena itu, yang terjadi lebih tepat disebut akomodasi disertai penyerapan daripada pembersihan.

Problematis: Kekuasaan Prabowo tidak hanya bertumpu pada mayoritas di DPR, tetapi juga pada kabinet yang besar dan berulang kali dirombak, serta pada kendali atas pimpinan TNI dan Polri.

2. DPR DAN PUBLIK KEHILANGAN DAYA KONTROL

Koalisi besar tidak otomatis buruk. Yang menjadi soal adalah apakah lembaga pengawas masih bekerja. Ilmuwan politik Nancy Bermeo (2016) mengingatkan bahwa kemunduran demokrasi masa kini jarang terjadi lewat kudeta. Ia lebih sering terjadi lewat *executive aggrandizement*, yaitu pelemahan pengawasan secara bertahap oleh pemerintah yang terpilih secara sah, melalui prosedur yang juga sah.

Bukti pertama adalah DPR berhenti memakai alat pengawasannya. Selama dua tahun, tidak ada hak angket (hak DPR menyelidiki kebijakan pemerintah) maupun hak interpelasi (hak meminta keterangan resmi dari Presiden) yang digunakan, termasuk ketika korban keracunan MBG mencapai puluhan ribu. Indeks Kinerja Parlemen 2025 dari Indonesian Parliamentary Center (IPC) memberi skor 1,57 dari 5 untuk penggunaan hak pengawasan, dan laporan kinerja DPR sendiri mencatat hanya 15 dari 42 panitia kerja pengawasan yang selesai.

Bukti kedua adalah bagaimana cara undang-undang dibuat. UU TNI disahkan pada 20 Maret 2025 dengan dukungan seluruh fraksi, setelah pembahasan yang sebagian digelar tertutup di hotel. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan atas prosesnya dengan suara tipis 5-4; empat hakim menilai prosesnya cacat. UU Polri disahkan pada 9 Juni 2026, hanya 20 hari setelah diusulkan. Ada dua belas rapat dengar pendapat dan satu usulan masyarakat sipil yang diakomodasi, yaitu penguatan Kopolnas, tetapi tidak ada dokumen yang menjelaskan masukan mana yang diterima atau ditolak. Kedua undang-undang ini memperluas peran aparat di jabatan sipil. Di sini terjadi umpan balik: DPR yang terkonsolidasi menghasilkan undang-undang yang memperbesar kendali Presiden di arena aparat.

Ketika saluran resmi tidak bekerja, kritik pindah ke jalan. Komnas HAM mencatat sedikitnya 10 orang meninggal dalam demonstrasi Agustus 2025, dan Amnesty International Indonesia mencatat 6.003 orang ditangkap atau mengalami kekerasan dalam rangkaian protes 2025-2026. Indeks internasional bergerak searah. Misalnya, V-Dem mengklasifikasikan Indonesia sebagai *electoral autocracy* (demokrasi elektoral yang otokratis) sejak 2024, EIU menurunkan skor Indonesia ke 6,37, sementara Freedom House stagnan di 56 dari 100. Sebagian penurunan itu sudah dimulai sebelum pemerintahan ini.

Ada memberikan lima tanda untuk mengenali pelemahan bertahap. Tabel berikut menguji kelimanya dengan data dua tahun terakhir. Hasilnya tidak seragam: dua tanda terlihat kuat, dua sedang, dan satu lemah. Artinya, kemunduran terjadi terutama di DPR dan proses legislasi, bukan di seluruh lembaga.

Tanda Pelemahan	Peristiwa 2024-2026
Pemerintah menguasai agenda	Prioritas Presiden (MBG, UU TNI, UU Polri) diproses tanpa hambatan
Tidak ada penolakan di legislatif	Nol suara menolak dari fraksi atas RUU pemerintah; PDI-P memilih menjadi "penyeimbang"
Prosedur dipercepat	UU Polri disahkan 20 hari setelah diusulkan; Kapolri dipilih dalam satu hari; pembahasan UU TNI sebagian tertutup
Partisipasi publik ditiadakan	Rapat dengar pendapat tetap digelar, tetapi tidak ada penjelasan masukan mana yang diterima atau ditolak
Lembaga penyeimbang dinetralkan	KPK menghentikan sementara penyelidikan MBG; MK mengeluarkan putusan mengikat dan BPK mengungkapkan temuan, namun stagnan

Faktanya, pengawasan formal DPR tidak digunakan. Pengawasan itu belum efektif mengubah keputusan, karena informasi yang terungkap di rapat komisi tidak berlanjut menjadi koreksi. Belum terbukti bahwa pemerintah sengaja melemahkan DPR. Urutan waktu antara amnesti Hasto dan perubahan sikap PDI-P memang mencolok, dan sejumlah melaporkan politisi koalisi enggan bersuara karena takut konsekuensi, tetapi belum ada bukti langsung tentang pertukaran politik.

Problematis: DPR berubah dari pengawas menjadi pengesah. Pola ini cocok dengan tahap awal *executive aggrandizement* di bidang pembuatan undang-undang, meski bukti bahwa pelemahan itu disengaja belum cukup.

3. MBG: ANGGARAN MELESAT, PENGAWASAN TERTINGGAL

Jika pengawasan di awal lemah, akibatnya seharusnya terlihat pada pelaksanaan program. MBG adalah ujian paling jelas karena memadukan prioritas Presiden, anggaran terbesar, dan pelaksana yang sangat banyak: BGN, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, yayasan mitra, dan puluhan ribu dapur. Pressman dan Wildavsky (1973) menunjukkan bahwa semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar celah antara keputusan di pusat dan kenyataan di lapangan.

Kronologinya menunjukkan ekspansi mendahului kesiapan. MBG dimulai 6 Januari 2025. Hingga 30 September 2026, program ini menjangkau 57 juta penerima melalui 27.486 dapur, dengan belanja Rp153,2 triliun (Kemenkeu, 9 Oktober 2026). Jumlah dapur bahkan melampaui target awal 21.000 sebelum pendaftaran dihentikan. Sementara itu, per Mei 2026, baru 56,72 persen dapur memiliki sertifikat laik higiene (Kemenkes). Jumlah korban keracunan naik dari 37.673 pada Mei menjadi 50.059 pada September 2026. Insiden terus berulang, misalnya 395 orang terdampak di Kota Cirebon pada 20 Oktober 2026.

Mengapa angka korban MBG berbeda-beda? Publik kerap menerima dua angka yang sangat berbeda. Kementerian Kesehatan mencatat 50.059 korban secara kumulatif sejak program dimulai hingga 2 September 2026. Angka BGN sebesar 5.482 hanya mencakup kejadian sejak 22 Juli 2026, sehingga tidak bisa dibandingkan langsung. Brief ini memakai angka Kemenkes karena cakupannya paling lengkap. Belum ada data insiden per dapur atau per satu juta porsi, padahal data inilah yang diperlukan untuk menilai apakah keamanan pangan benar-benar membaik.

Masalah tata kelola menyusul. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pengadaan kendaraan dan peralatan TIK yang melebihi standar biaya sebesar Rp541,64 miliar. Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka, termasuk mantan Kepala BGN, atas dugaan penunjukan yayasan yang terafiliasi dengan pimpinan BGN dan penggelembungan harga pengadaan. Pola ini sesuai dengan salah satu alat dalam kotak peralatan presiden, yaitu pemberian keistimewaan, meski kesalahan para tersangka belum diputus pengadilan.

Penjelasan lain tetap harus diakui. MBG adalah program baru berskala raksasa, standar dapurnya belum matang, kemampuan pengadaannya lemah, dan kewenangannya terbagi di banyak lembaga. Faktor-faktor ini bisa menimbulkan masalah tanpa keterlibatan politik apa pun. Peran konsolidasi kekuasaan terlihat pada tiga titik yang dapat diamati: anggaran naik tanpa hambatan di DPR, tidak ada penyelidikan DPR meski korban berjatuh, dan dugaan penunjukan mitra yang terafiliasi. Adapun dampak MBG terhadap gizi dan pendidikan anak belum dapat dinilai, karena belum ada evaluasi dampak dan survei status gizi nasional tidak dilaksanakan pada 2025.

Problematis: Anggaran dan jangkauan MBG tumbuh jauh lebih cepat daripada kemampuan negara mengawasi mutu dan keamanannya. Peran politik di dalamnya nyata, tetapi bukan satu-satunya yang menjadi penyebab.

4. CEPAT UNTUK BELANJA, LAMBAT UNTUK REFORMASI

Apakah pola MBG juga terjadi di program lain? Untuk mengujinya, brief ini membandingkan MBG dengan program yang karakternya berbeda. Pembanding utamanya adalah reformasi penerimaan negara, yang dijanjikan melalui pembentukan Badan Penerimaan Negara dan target rasio penerimaan 23 persen dari PDB. Program ini dipilih bukan karena hasilnya buruk, tetapi karena keberhasilannya bergantung pada perubahan lembaga dan birokrasi, bukan pada besarnya anggaran.

Hasilnya berbeda arah. Badan Penerimaan Negara tidak terbentuk, penerimaan pajak 2025 hanya 87,6 persen dari target, dan rasio perpajakan turun ke 9,31 persen PDB. Hingga September 2026, penerimaan pajak baru mencapai 68,2 persen target, dan Menteri Keuangan sudah berganti dua kali. Sebaliknya, Sekolah Rakyat yang diperluas secara bertahap (182 lokasi dan sekitar 44 ribu siswa) tidak menunjukkan insiden sistemik dalam sumber yang dihimpun.

Program	Penggerak Utama	Kesiapan Lembaga	Hasil Dua Tahun
Makan Bergizi Gratis	Perintah Presiden dan anggaran besar	Rendah: standar dapur dan pengawasan disusun sambil berjalan	Jangkauan luas, tetapi insiden keamanan pangan dan perkara korupsi
Sekolah Rakyat	Perintah Presiden, diperluas bertahap	Sedang: dimulai di lokasi terbatas	182 lokasi, ±44 ribu siswa; tanpa insiden sistemik yang tercatat
Reformasi penerimaan negara	Perubahan lembaga dan birokrasi pajak	Rendah: lembaga baru tidak dibentuk	Pajak 87,6% target (2025); rasio pajak turun ke 9,31% PDB
Koperasi Desa Merah Putih	Perintah Presiden, pembentukan lembaga di desa	Rendah: badan hukum terbentuk, operasi tertinggal	10.070 beroperasi dari target 80.000

Perbandingan ini menunjukkan bahwa yang menentukan keberhasilan bukan seberapa besar dukungan politik, tetapi seberapa siap lembaga pelaksanaannya dan seberapa cepat program diperluas. Sekolah Rakyat dan MBG sama-sama didorong langsung oleh Presiden, tetapi hasilnya berbeda karena laju perluasannya berbeda.

Pola yang sama terlihat pada capaian Asta Cita. Dari 17 Program Prioritas, hanya satu yang baik pada tingkat keluaran, tujuh campuran, enam lemah, dan tiga belum dapat dinilai; peta per misi ada di Lampiran C. Program yang cukup digerakkan dengan perintah dan anggaran, seperti pangan, pupuk, dan pemeriksaan kesehatan gratis, bergerak cepat. Program yang menuntut pembenahan lembaga, seperti penerimaan negara, pemberantasan korupsi, perumahan, dan Koperasi Desa Merah Putih (10.070 beroperasi dari target 80.000), tertinggal.

Hasil bagi rumah tangga pun belum merata. Kemiskinan turun sekitar 1,13 juta orang sejak September 2024, tetapi target RPJMN 2025 sebesar 7–8 persen tidak tercapai. Kemiskinan di desa nyaris tidak bergerak (10,72 menjadi 10,67 persen), rasio Gini naik dari 0,363 menjadi 0,368, dan biaya hidup minimum kelompok miskin naik 9,86 persen dalam setahun. Hanya 36,8 persen responden Poltracking yang puas terhadap kinerja ekonomi. Data ini tidak diklaim sebagai akibat langsung konsolidasi kekuasaan, tetapi menunjukkan bahwa manfaat belum terdistribusi luas.

Problematis: Konsentrasi kekuasaan mempercepat keputusan belanja, tetapi tidak dengan sendirinya mempercepat pembenahan lembaga. Masalah terbesar muncul ketika program besar diperluas cepat, sementara kapasitas pengawasannya tertinggal.

5. KOREKSI DATANG TERLAMBAT DAN DARI DALAM ISTANA

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu menemukan dan memperbaiki kesalahannya. Guillermo O'Donnell (1998) menyebut kemampuan lembaga negara untuk saling mengawasi sebagai horizontal accountability. Ukurannya bukan sekadar ada atau tidaknya lembaga pengawas, tetapi apakah lembaga itu independen, benar-benar bertindak, dan tindakannya mengubah keputusan.

Pada MBG, koreksi pertama yang berarti baru datang sekitar 16–19 bulan setelah program dimulai, ketika korban sudah lebih dari 37 ribu. Pada Februari 2026, Presiden masih menyebut program “99,99 persen berhasil”. Dari sisi pelakunya, lembaga independen yang bertindak hanya dua. BPK menerbitkan temuan audit pada Mei 2026, dan BGN telah mengembalikan 81,75 persen nilai temuan. Mahkamah Konstitusi memutuskan pada Juli 2026 bahwa MBG bukan komponen utama pendidikan dan wajib dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat APBN 2028. Pemerintah memilih tenggat terakhir itu, sehingga APBN 2027 masih memuat sekitar Rp240 triliun MBG di pos pendidikan.

Koreksi justru datang dari Kejaksaan Agung, yang berada di bawah Presiden. Pada saat yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga yang lebih independen, menghentikan sementara penyidikannya atas MBG (Kompas.com, 17 Juni 2026). DPR hanya membuka data dalam rapat, tanpa menggunakan hak penyidikannya. Akibatnya, koreksi bergantung pada kehendak eksekutif, bukan pada kemampuan lembaga lain secara independen untuk memaksanya. Semua koreksi juga berhenti di tingkat operasional, seperti mengganti pimpinan BGN, menutup 1.276 dapur tanpa sertifikat, dan mengubah skema insentif. Desain dasarnya, yaitu cakupan universal dan model kemitraan yayasan, tidak tersentuh.

Lembaga	Tindakan atas MBG	Independen dari Presiden?	Mengubah desain program?
DPR	Membuka data dalam rapat komisi; tanpa angket atau interpelasi	Ya, secara formal	Tidak
BPK	Temuan pengadaan Rp541,64 miliar (Mei 2026); 81,75% telah dikembalikan	Ya	Tidak, hanya pemulihan kerugian
Mahkamah Konstitusi	Putusan 40/2026 (Juli 2026): MBG wajib dipisahkan dari anggaran pendidikan	Ya	Sebagian, tetapi baru berlaku paling lambat APBN 2028
Kejaksaan Agung	Tujuh tersangka, termasuk mantan Kepala BGN (Juni–Juli 2026)	Tidak, di bawah Presiden	Tidak
KPK	Menghentikan sementara penyelidikan (Juni 2026)	Sebagian	Tidak
Presiden dan BGN	Mengganti pimpinan BGN, menutup 1.276 dapur tanpa sertifikat, mengubah skema insentif	Tidak	Mulai, terbatas pada aspek operasional

Problematis: koreksi memang terjadi, tetapi lambat, parsial, dan sebagian besar dilakukan oleh pemerintah sendiri. Rem yang independen, yaitu MK dan BPK, lemah tetapi belum lumpuh.

6. APA YANG TERBUKTI DAN APA YANG BELUM

Rantai argumen brief ini diuji tahap demi tahap. Tabel berikut merangkum kekuatan bukti untuk setiap tahap, agar pembaca dapat membedakan temuan dari tafsiran.

Tahap Dalam Rantai	Bukti Utama	Status
Kekuasaan terkumpul di tiga arena	81% kursi DPR; 109 anggota kabinet dan tujuh reshuffle; rotasi pucuk TNI-Polri; UU yang memperluas jabatan sipil aparat	Fakta
Konsolidasi melemahkan pengawasan DPR	Hak pengawasan tidak dipakai; kaitan dengan insentif koalisi masih dugaan	Didukung sebagian
Pengawasan lemah membuat program melaju sebelum siap	Anggaran MBG naik ± 4 kali tanpa hambatan; dapur melampaui target, sertifikasi baru 56,72%	Didukung
Ekspansi cepat menimbulkan masalah pelaksanaan	Temuan BPK; perkara Kejangung; insiden berulang. Data insiden per dapur belum tersedia	Didukung sebagian
Pengawasan awal yang lemah membuat koreksi terlambat	Koreksi pertama 16–19 bulan setelah peluncuran, tanpa penyelidikan DPR	Didukung
Koreksi parsial membuat hasil kurang optimal	Insiden berlanjut setelah koreksi; dampak gizi belum diukur	Belum terbukti

Tiga penjelasan lain tetap perlu dipertimbangkan. Pertama, sebagian masalah berasal dari keterbatasan birokrasi dan karakter program yang masih baru. Kedua, minimnya oposisi bukan hal baru: pada akhir era Jokowi, koalisi bahkan menguasai 91,3 persen kursi. Ketiga, rotasi TNI-Polri sebagian merupakan siklus organisasi yang melalui prosedur resmi. Dengan mempertimbangkan semua itu, kesimpulan yang paling dapat dipertanggungjawabkan ialah: konsolidasi kekuasaan meningkatkan kemampuan memutuskan, tetapi tidak membangun kemampuan melaksanakan dan mengoreksi, dan celah ini krusial bila program besar diperluas dengan cepat.

REKOMENDASI

Rekomendasi diarahkan pada titik-titik krusial: pengawasan sebelum keputusan diambil, kesiapan sebelum program diperluas, dan koreksi oleh lembaga yang independen. Setiap langkah memiliki penanggung jawab, tenggat, dan ukuran keberhasilan yang dapat diperiksa publik.

Pertama, menyelamatkan dan membenahi MBG. Kementerian Kesehatan dan BGN harus menerbitkan satu basis data insiden keamanan pangan yang dapat diaudit, diperbarui setiap minggu per kabupaten/kota, paling lambat Desember 2026. Tidak boleh ada dapur yang beroperasi tanpa sertifikat laik higiene. Daftar yayasan mitra dan kontrak pengadaan BGN perlu dibuka ke publik. KPK perlu melanjutkan penyelidikan atau menjalankan supervisi atas perkara MBG agar penegakan hukum tidak hanya bergantung pada Kejaksaan Agung.

Bappenas perlu menugaskan evaluator independen untuk mengukur dampak MBG terhadap gizi dan kehadiran sekolah, dengan data dasar pada triwulan III 2027. Hasilnya menjadi dasar keputusan apakah MBG tetap untuk semua anak atau difokuskan pada kelompok paling membutuhkan dalam RAPBN 2028. Ukuran keberhasilannya adalah jumlah insiden per satu juta porsi yang turun dari data dasar Desember 2026, bukan sekadar persentase dapur bersertifikat.

Kedua, memulihkan fungsi pengawasan DPR dan transparansi aparat. Pimpinan DPR dan Badan Legislasi perlu merevisi Tata Tertib agar naskah akademik dan draf RUU strategis terbit sedikitnya 30 hari sebelum pembahasan tingkat I, disertai tabel yang menjelaskan masukan publik mana yang diterima atau ditolak beserta alasannya. Setiap kesimpulan rapat kerja perlu dicatat dalam register publik beserta status tindak lanjutnya, mulai Masa Sidang II 2026–2027. Komisi I dan Komisi III, bersama Mabes TNI dan Mabes Polri, perlu memublikasikan setiap semester jumlah prajurit dan polisi aktif yang menduduki jabatan sipil. Untuk jangka menengah, DPR perlu meninjau syarat pengusulan hak angket dan interpelasi dalam UU MD3, yang kini mensyaratkan dukungan lebih dari satu fraksi. Perlu diakui, transparansi tidak otomatis memulihkan independensi politik DPR, tetapi transparansi membuat ketiadaan pengawasan terlihat oleh publik.

Ketiga, mengunci akuntabilitas anggaran dan hasil. Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR harus memastikan rincian APBN 2027 memenuhi syarat Putusan MK 40/PUU-XXIV/2026, yaitu bahwa anggaran pendidikan di luar MBG tetap sedikitnya 20 persen belanja negara, dan memisahkan MBG dari fungsi pendidikan dalam RAPBN 2028 sesuai kewajiban putusan. Anggaran program prioritas, termasuk MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, perlu ditandai hingga tingkat keluaran agar dapat dilacak publik. BPK perlu melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Koperasi Desa Merah Putih dan Danantara, dengan hasil dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2027.

Langkah	Penanggung Jawab	Tenggat	Ukuran Keberhasilan
Basis data insiden MBG yang dapat diaudit; nol dapur tanpa sertifikat	Kemenkes, BGN, BPOM	Desember 2026	Insiden per 1 juta porsi turun
Penyelidikan atau supervisi KPK atas perkara MBG	KPK	Desember 2026	Status penanganan diumumkan
Evaluasi dampak MBG oleh pihak independen	Bappenas, BGN, Kemenkes	Data dasar triwulan III 2027	Keputusan desain RAPBN 2028 berbasis bukti

Langkah	Penanggung Jawab	Tenggat	Ukuran Keberhasilan
Draf RUU terbit ≥30 hari dan tabel tanggapan publik	Pimpinan DPR, Badan Legislasi	Masa Sidang II 2026–2027	Perubahan naskah dapat ditelusuri ke masukan publik
Publikasi aparat aktif di jabatan sipil	Komisi I dan III, Mabes TNI, Mabes Polri	Setiap semester mulai 2027	Data terbit tepat waktu
Kepatuhan Putusan MK 40/2026	Kemenkeu, Banggar DPR	Rincian APBN 2027; RAPBN 2028	Pendidikan di luar MBG ≥20% belanja
Pemeriksaan BPK atas Koperasi Desa Merah Putih dan Danantara	BPK	IHPS I 2027	Laporan hasil pemeriksaan terbit

Prasyarat dan risiko. Ketiga rekomendasi ini menghadapi hambatan yang sama: mayoritas koalisi tidak memiliki insentif untuk mengawasi pemerintahnya sendiri. Oleh karena itu, langkah yang paling realistis dalam jangka pendek adalah langkah yang tidak memerlukan pemungutan suara mayoritas, seperti publikasi data oleh kementerian, pemeriksaan BPK, dan kepatuhan pada putusan MK. Fraksi di luar kabinet, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan media berperan memastikan data yang dijanjikan benar-benar terbit dan dapat diuji. Rekomendasi yang bergantung pada revisi Tata Tertib dan UU MD3 lebih sulit, tetapi tetap perlu diajukan agar posisi setiap fraksi tercatat di hadapan publik.

HAL YANG PERLU DIPANTAU PADA TAHUN KETIGA

- Rincian APBN 2027 (akhir 2026): apakah anggaran pendidikan di luar MBG mencapai sedikitnya 20 persen belanja negara sesuai Putusan MK 40/2026.
- Data keamanan pangan MBG: apakah data insiden per kabupaten/kota dan per satu juta porsi diterbitkan, dan apakah tren insiden turun setelah dapur tanpa sertifikat ditutup.
- Perkara BGN di pengadilan dan sikap KPK: apakah penegakan hukum berlanjut hingga putusan dan menjangkau pola penunjukan yayasan mitra secara menyeluruh.
- Penempatan aparat aktif di jabatan sipil: berapa banyak prajurit dan polisi aktif yang menduduki jabatan sipil setelah UU TNI dan UU Polri berlaku, dan apakah datanya dibuka.
- Pemakaian hak pengawasan DPR: apakah ada fraksi yang mengusulkan hak angket atau interpelasi, dan bagaimana sikap fraksi lain terhadap usulan itu.

Ukuran pemerintahan yang baik bukan hanya kecepatan mengambil keputusan, tetapi kemampuan memastikan keputusan itu diawasi, dilaksanakan sesuai standar, dan diperbaiki ketika gagal. Dalam dua tahun pertama, pemerintahan Prabowo–Gibran unggul pada yang pertama dan tertinggal pada yang kedua. Tahun ketiga akan menunjukkan apakah kekuasaan yang terkumpul juga dipakai untuk membangun kemampuan memperbaiki diri, dimulai dari rincian APBN 2027 dan pembenahan MBG.

CATATAN SUMBER

Data dihimpun dari sumber resmi (BPS, Kemenkeu, Kemenkes, BPK, putusan MK, Kejaksaan Agung, Setneg), laporan lembaga independen dan organisasi masyarakat sipil (IPC, Formappi, V-Dem, Freedom House, EIU, Amnesty International Indonesia, YLBHI, Imparsial, KontraS, JPPI), survei (Poltracking, SMRC), dan media (Reuters, The Jakarta Post, Kompas, Tempo, detikNews, CNBC Indonesia, CNN Indonesia, Tirto, Antara. Literatur: Bermeo, N. (2016). On Democratic Backsliding. *Journal of Democracy*, 27(1); Chaisty, P., Cheeseman, N., & Power, T. J. (2018); Mietzner, M. (2023). *The Coalitions Presidents Make*. Cornell University Press; O'Donnell, G. (1998). Horizontal Accountability in New Democracies. *Journal of Democracy*, 9(3); Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation*. University of California Press.